



## Tak Terdaftar Askes

### 2% PNS Pemkot

**Diduga karena Proses Mutasi sehingga Masih Terdaftar di Daerah Lain**

**YOGYAKARTA (SI)**—Sedikitnya 2% dari total 9.300 pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta belum terakomodir dalam asuransi kesehatan (Askes). Implikasinya, mereka kehilangan hak pelayanan kesehatan sosial yang disediakan oleh pemerintah melalui PT Askes.

Kepala Cabang Utama PT Askes DIY Sri Ponco Handayani mengaku belum mengetahui secara pasti alasan tidak terdaftarnya sejumlah PNS di lingkungan pemkot sebagai peserta askes. Namun, kata dia, hal itu mungkin saja terjadi. Ada beberapa penyebab mengapa seorang PNS tidak atau belum terakomodir di PT Askes. Bisa karena proses mutasi, kesalahan administrasi, ataupun *human error*.

"Dari data yang ada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan database PT Askes memang ada puluhan PNS yang belum terdaftar sebagai peserta Askes. Dugaan sementara mereka yang belum terdaftar karena mutasi yang dialaminya. Sehingga, kartu Askes yang dimiliki terdaftar di daerah lain," katanya saat jumpa pers di Kantor Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Yogyakarta kemarin.

Guna memperbaiki database tersebut, kata Ponco, pihaknya saat ini tengah melakukan *updating* peserta Askes. Rencananya, *updating* berlangsung hingga akhir bulan ini. Selain daftar kepesertaan PNS, pembaharuan data juga dilakukan terhadap para pensiunan, Pepsabri, dan veteran. *Updating* ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sistem *askes online* di seluruh Indonesia.

"Selain itu *updating* ini juga dilakukan guna mencari tahu tingkat kepesertaan pada program pemeliharaan kesehatan Askes. Kartu *askes online* ini bisa dipakai di mana saja namun tetap menganut aspek kewilayahan. Sehingga perlu adanya proses administrasi yang ditempuh," ujar Sri Ponco.

Terkait alokasi anggaran yang disediakan oleh PT Askes untuk melayani pemeliharaan kesehatan kepesertaan se-DIY tahun ini mencapai Rp147 miliar. Dari dana sebesar itu, ketersediaan hingga akhir Mei sebanyak 32%. Diperkirakan akhir tahun ini ketersediaan dana akan melonjak lebih dari 100% atau lebih dari anggaran yang tersedia.

"Ini dikarenakan sejak awal Mei dan awal Juli mendentang tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit negeri dan swasta mengalami kenaikan yang cukup tinggi," ujar dia.

Kenaikan ini terbagi, kenaikan tarif rawat jalan hingga 70% dari tarif semula. Sedangkan untuk tarif rawat inap naik sebanyak 36% dari tarif semula. Di kota-kota besar, lanjut dia, pembayaran premi memang tidak sebanding dengan dana penanggungan. Di DIY, 2008 lalu, nilai premi yang diterima PT Askes hanya Rp59 miliar. Sedangkan angka pertanggungannya lebih dari 108 miliar. Untuk menutupi kekurangan, pihaknya masih berharap pasokan dana dari PT Askes Pusat.

"Jadi, sistemnya subsidi silang. Karena di beberapa daerah lain justru surplus. PT Askes mampu mencukupi karena pemerintah sudah tidak meminta dividen lagi," urainya.

Kepala UPT Jamkesda Kota Jogja Kusminatun menuturkan, untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada seluruh warga kota, pemkot berencana akan menerapkan program dana kesehatan (*universal coverage*) yang saat ini tengah digodok untuk diujicobakan di lima kecamatan di Kota Yogyakarta. Dengan sistem subsidi silang yang coba diterapkan maka ke depan diharapkan warga kota memiliki kemandirian untuk melakukan pembiayaan kesehatannya.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2.			
3. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005